

**STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
TERHADAP POTENSI DESA**

Syamsul Arifin<sup>1</sup>, Ainur Rofiq<sup>2</sup>

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: [syamsularifin@yahoo.com](mailto:syamsularifin@yahoo.com)

**Abstract**

*Designing a change plan then what is needed is the conformity between the plan that we do in accordance with the state of society. This study uses normative juridical research to find the truth of coherence, namely how the strategy of developing Islamic communities in increasing community participation in the potential of the village. Furthermore, this research, literature (library research). The approach used in this research is a qualitative approach that is often called a naturalistic research method because the research is carried out in natural conditions (natural setting). Research materials use primers that are authoritative while skunder materials are publications that include books and journals. The results of the study that with the participation of the community as a form of empowerment of local communities which certainly provides opportunities and opportunities for the community to participate and be involved in developing the potential of the village to be more effective and efficient to achieve the desired goals and feel they have and be responsible. Strategi used first, the Growth strategy. Second, the Welfare Strategy. Third, the Responsitive strategy. Fourth, the integrated or holistic strategy.*

**Keywords :** Development, Community, Village Potential.

**Abstrak**

*Merancang rencana perubahan maka yang dibutuhkan adalah kesesuaian antara rencana yang kita lakukan sesuai dengan keadaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu bagaimana strategi pengembangan komunitas Islam dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap potensi desa. Selanjutnya, penelitian ini, literatur (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alam (natural setting). Bahan penelitian menggunakan primer yang berwibawa sedangkan materi skunder adalah publikasi yang mencakup buku dan jurnal. Hasil penelitian bahwa dengan peran serta masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal yang tentunya memberikan kesempatan dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengembangan potensi desa agar lebih efektif dan efisien untuk*

*mencapai tujuan yang diinginkan dan merasa memiliki dan bertanggung jawab. Strategi digunakan pertama, strategi Pertumbuhan. Kedua, Strategi Kesejahteraan. Ketiga, strategi Responsitif. Keempat, strategi terpadu atau holistik. Hasil penelitian bahwa dengan peran serta masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal yang tentunya memberikan kesempatan dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengembangan potensi desa agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan merasa memiliki dan bertanggung jawab. Strategi digunakan pertama, strategi Pertumbuhan. Kedua, Strategi Kesejahteraan. Ketiga, strategi Responsitif. Keempat, strategi terpadu atau holistik.*

**Kata Kunci :** *Pengembangan, Masyarakat, Potensi Desa*

Accepted: May 05 2022	Reviewed: May 14 2022	Published: May 31 2022
--------------------------	--------------------------	---------------------------

## **A. Pendahuluan**

Strategi secara sederhana dan eksplisit memiliki makna sebagai cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan serta kemampuan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pengembangan masyarakat (*community development*) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta et al., 2008).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan masyarakat Islam adalah cara untuk mengaktualisasikan potensi yang dalam hal ini dikenal dengan istilah modal sosial, yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan masyarakat adalah penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir dan memanajemen diri mereka sendiri untuk mampu mandiri pada akhirnya. Adapun manajemen pengembangan Masyarakat Islam mencakup semua aspek kehidupan baik itu yang mengatur dan mengembangkan dalam bidang kemiskinan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, dan agama (Ilahi & Munir, 2006).

Secara umum, ada empat strategi yang dapat diberlakukan dalam kaitan dengan pengembangan masyarakat (Sulistiawan & Supriatna, 2019), yakni *pertama, the Growth strategy*. Strategi pertumbuhan adalah bahwa untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan per

kapita penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan. *Kedua, The Welfare Strategy*. Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. *Ketiga, The Responsitive strategy*. Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. *Keempat, the integrated or holistic strategy*. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan, pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam pengembangan potensi desa, agar tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan terjadi penurunan kualitas lingkungan, sehingga dalam pengelolaan potensi desa akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera seiring dengan kelestarian alam. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola potensi desa yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi antar pemangku kepentingan yang ada serta keterlibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta atau industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Wujud partisipasi masyarakat terkait yaitu mengawasi dan mengontrol pembangunan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pengembangan potensi desa, mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan desa keden lebih baik.

Partisipasi menurut Keith Devis dikutip dari Totok Mardikanto, adalah suatu mental dan emosi seseorang kepada pencapaian-pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya (Mardikanto & Soebiato, 2012). Menurut Aprillia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Theresia et al., 2015). Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007). Jadi partisipasi adalah sebuah keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang memperlihatkan

keikutsertaanya dalam suatu program atau kegiatan, dan dalam kegiatan itu menampilkan rasa kebersamaan tim atau kelompok.

Masyarakat menurut Mac Iver dan Page yang dikutip dari Lubis menyatakan bahwa masyarakat adalah “suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan golongan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia. Ralph Linton, menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka. Sementara Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Lubis, 2017). Dari definisi tersebut Soerjono Soekanto menyimpulkan 4 ciri masyarakat: *pertama*, manusia yang hidup bersama, *kedua*, bercampur dalam waktu yang lama, *ketiga*, sadar sebagai satu kesatuan, *keempat*, merupakan suatu system hidup bersama (Soekanto, 1982).

Jadi masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang meliputi populasi, kebudayaan, organisasi sosial serta lembaga-lembaga sosial dimana mempunyai tujuan bersama dan tinggal dalam satu wilayah atau kawasan yang sama.

Adapun tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Selama ini masyarakat perdesaan dicirikan dengan kondisinya yang serba kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi, jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh diatas masyarakat perdesaan. Dari segi pendidikan, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh dibawah masyarakat perkotaan.

Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pembangunan wilayah pedesaan saat ini, secara umum kita dihadapkan pada banyak tantangan yang sangat berbeda sifatnya dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Tantangan pertama berkaitan dengan kondisi eksternal seperti perkembangan internasional yang berhubungan dengan *liberalisasi* arus investasi dan perdagangan global. Sedangkan yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan perubahan kondisi makro maupun mikro dalam negeri, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan pangan, masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah iptek, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi.

Kemanfaatan pembangunan dapat bersifat dekat dan dapat pula bersifat jauh. Ini tidak berarti hanya dalam jarak dan waktu tetapi juga dalam arti persepsi masyarakat terhadapnya. Persepsi yang jauh terhadap kemanfaatan yang tidak segera atau yang dalam jangka pendek diperoleh. Jika keadaanya seperti ini

biasanya orang-orang tidak responsif untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan bagaimana strategi pengembangan masyarakat Islam dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap potensi desa.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) (Mestika, 2004; Ansari, Raden Muyazin, 2020). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang sering disebut metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang *alamiah* (*natural setting*). Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiono, 2009; Ansari, Raden Muyazin, 2020).

Bahan penelitian menggunakan primer yang berifat autoritatif sedangkan bahan skunder yaitu bersifat publikasi yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen (Ansari, 2019). Adapun analisis data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder (Fauzi & Ansari, 2020). Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Strategi Pengembangan Masyarakat Islam**

Secara umum pengembangan masyarakat (*community development*) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta et al., 2008).

Menurut Twelvetrees, PM adalah "*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*" Secara khusus PM berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan (Twelvetrees, 2008).

Menurut Definisi Ibnu Kaldun, secara etimologi pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas. Masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam, yang meneliti hubungan dan keterkaitan ideologis yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Kaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan namun secara kodrati manusia memiliki kekurangan (Fajar, 2019). Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.

Manusia memiliki fitrah keagamaan, sehingga manusia membutuhkan agama. Kelahiran Islam, yang ditandai dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tahun gajah tanggal 12 Rabiul awal, atau tahun 570 M, adalah sebuah momen penting dalam sejarah Islam. Karena dari sinilah dimulai perjalanan panjang pengembangan masyarakat Islam yang menyatu dalam dakwah syi'ar Islam di jazirah arab.

Amrullah Ahmad dalam Nanih Machendrawati, mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Menstransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (usrah) kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah). Model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Machendrawaty & Safei, 2001).

Ada beberapa hal mengenai konsep dan tujuan pengembangan masyarakat Islam yang dinukilkan Ibnu Khaldun di dalam karya tulisnya yaitu:

- a. Individu, dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan. Namun secara qudroti manusia memiliki kekurangan dan kelemahan di samping kelebihan yang dimiliki. Sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun.
- b. *Ashabiyah* atau yang bisa juga disebut kekeluargaan merupakan sebuah kekuatan atas pertalian darah. Setiap patriotisme (solidaritas kekeluargaan). Sikap kekeluargaan ini jika dibina dan diarahkan kepada penanaman jiwa keagamaan maka akan menghasilkan sikap yang positif mengarah kepada sikap religius untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar.
- c. Masyarakat *Ijtima' al-Insani*, dengan sikap saling membutuhkan, tolong menolong dan solidaritas maka terciptalah sistem sosial masyarakat yang tergabung dalam al-ijtima' al insani. Berkaitan dengan pengembangan



masyarakat Islam maka masyarakat di sini diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang Islami.

- d. Negara, negara dalam konteks ini adalah merupakan suatu wadah dan alat baik melalui pemimpin, konstitusi ataupun undang-undang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran Islam.
- e. Peradaban, tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat madani (*civil society*), dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokratisasi, inklusivisme, independent, makmur dan sejahtera.

Adapun tahap-tahapan dalam strategi Pengembangan Masyarakat Islam dapat mengacu apa yang dijabarkan oleh; Isbandi Rukminto Adi, melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat senantiasa mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Adi, 2007):

- a. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini terdapat dua kegiatan yang perlu dilakukan yaitu penyiapan petugas dan penentuan lokasi program.
- b. Tahap *assesment*. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*) dan sumber daya yang dimiliki oleh warga masyarakat. Assesment misalnya dilakukan melalui metode partisipatory rural appraisal (PRA), focus group discussion (FGD)
- c. Tahap perencanaan *alternatif* program atau kegiatan. Pada tahap ini, pengelola program berusaha memfasilitasi warga masyarakat untuk menyusun perencanaan dan menetapkan program-program kerja sebagai agenda yang perlu dilaksanakan.
- d. Tahap formulasi rencana aksi. Kegiatan utama pada tahap ini adalah pihak agen perubahan membantu membimbing warga atau kelompok untuk menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan kepada pihak penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan program. Tahap implementasi program ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan rencana dapat berjalan dengan lancar, maka hal-hal yang mungkin menyebabkan terjadi pertentangan baik antara pengelola program dengan warga maupun pertentangan diantara warga supaya dapat dihindari.
- f. Tahap evaluasi. Kegiatan evaluasi perlu dilakukan pada semua program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui suatu tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
- g. Tahap *terminasi*. Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tahap terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi

karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya.

Sebenarnya tahap-tahapan inilah memang terjadi dalam pengembangan masyarakat tersebut. Yang menjadi problem dalam tahapan-tahapan tersebut sering terlupakan adalah aspek keberlanjutan dari program tersebut. Secara *implisit*, mungkin, dalam perencanaan program sudah direncanakan soal keberlanjutan program tersebut. Tetapi hal ini terasa belum cukup, karena segi keberlanjutan cenderung terabaikan, agar dieksplisit dalam bentuk tahapan, misalnya, tahap pelembagaan/keberlanjutan program.

## **2. Faktor-Faktor Pengembangan Masyarakat Islam**

### **a. Desiminasi dalam pengembangan masyarakat Islam**

Desiminasi menjadi faktor penting dalam pengembangan masyarakat islam. Agar perubahan sosial yang dilakukan oleh proses pengembangan masyarakat Islam menjadi nyata dan terwujud, maka desiminasi merupakan faktor gagasan dan ide menjadi melembaga dan membudaya masyarakat.

Bila dalam kontek pengembangan masyarakat Islam ingin mewujudkan tentang kesehatan lingkungan berbasis komunitas, dan ini ide baru. Hal ini memerlukan proses desiminasi, agar ide tersebut dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat yang diberdayakan tersebut (Gatlin & Brown, 1990). Desiminasi menjadi faktor penting yang secara terus menerus dilakukan dalam setiap tahapan-tahapan pengembangan masyarakat, baik pada perencanaan, pelaksanaan, pelembagaan dan monitoring serta evaluasi program tersebut.

Desiminasi dilakukan dalam pengembangan masyarakat karena dua hal, pertama, agar inovasi atau ide baru diterima dan menjadi agenda bersama seluruh stakeholder dalam pengembangan masyarakat tersebut. Kedua, sebagai wahana untuk bertukar gagasan yang produktif untuk tercapai tujuan dari pengembangan masyarakat tersebut.

### **b. Koordinasi dalam Pengembangan Masyarakat.**

Pengembangan masyarakat Islam dalam melaksanakan kegiatannya melibatkan banyak orang atau kelompok. Pelibatan individu, kelompok atau masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien jikalau dilakukan koordinasi yang baik pula. Dalam pengembangan masyarakat, koordinasi meliputi perorangan/individu atau kelompok yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi hanya dapat dilaksanakan apabila setiap individu melibatkan diri dengan apa yang dikerjakan orang lain dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut.

Dalam kaitan pengembangan masyarakat, koordinasi dilaksanakan pada tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelembagaan kegiatan



maupun monitoring dan evaluasi. Koordinasi yang efektif diperlukan dalam tahapan-tahapan tersebut untuk menghindari masalah tumpang tindih yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Di sisi lain, setiap stakeholder yang terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat harus mempunyai pedoman yang jelas yang berlandaskan pada kebijaksanaan atau nilai-nilai yang dianut organisasi, sehingga memungkinkan semua pihak bekerja efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Falsafah kerja, tujuan dan peran organisasi mutlak harus dipahami oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengembangan masyarakat sebelum melaksanakan koordinasi dalam program.

c. Peranan Tokoh Masyarakat dalam pengembangan masyarakat

Kehadiran dan pengaruh tokoh masyarakat dalam struktur masyarakat kita masih bermakna strategis terutama sekali pada masyarakat yang sederhana (*homopili*), yaitu masyarakat yang hidup di pedesaan. Pada masyarakat pedesaan, kepercayaan dan ketergantungan pada tokoh masyarakat sangatlah besar, lain halnya dengan masyarakat yang sudah maju (*heteropili*) seperti di masyarakat perkotaan derajat ketergantungan maupun perwujudannya sangatlah berbeda. Namun demikian selama dalam masyarakat itu masih ada unsur-unsur kepercayaan dan nilai-nilai sosial yang dianut serta dipertahankan maka keberadaan tokoh masyarakat akan selalu mendapatkan posisi yang terbaik dalam kehidupan masyarakat.

Ketika anggota masyarakat dihadapkan pada berbagai pesan atau ide dalam pengembangan masyarakat baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknologi dan lainnnnya, disitu mereka dituntut memberikan keputusan menerima atau menolaknya, keputusan itu tentu saja dapat bermanfaat bagi dirinya, pada kaitan ini mereka akan bertanya dan minta jawaban kepada tokoh masyarakat tersebut.

Keberadaan tokoh masyarakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat, pertama menjadi jembatan penghubung antara fasilitator dengan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Kedua, menjadi fasilitator bagi usaha dan upaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Kedua hal ini pada dasarnya menempatkan atau memposisikan bahwa tokoh masyarakat, dalam konteks pembangunan masyarakat tersebut adalah memberi bantuan untuk memperlancar, meningkatkan, mempercepat dan menjamin berhasil penyelenggaraan usaha-usaha pengembangan masyarakat teresebut.

d. Manajemen Konflik dalam Pengembangan Masyarakat Islam.

Pengembangan masyarakat itu mengelola banyak stakeholder dengan beragam kepentingan, karakter, ideologi dan atribut lainnya (Conyers, 1991). Hal ini sangatlah potensial tumbuhnya konflik yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan dari pengembangan masyarakat tersebut. Konflik-konflik dalam konteks pengembangan masyarakat pasti ada dan inheren dalam kegiatan tersebut (Susilo, 2008). Sehingga hal ini bukan sesuatu yang dihindari tetapi bagaimana dikelolanya sehingga konflik itu menjadi produktif bukannya kontra produktif bagi suksesnya program atau kegiatan tersebut.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen konflik pada pelaksanaan pengembangan masyarakat tersebut; *pertama*, dialog. Dialog adalah kegiatan untuk membangun kepercayaan, pengertian dan hubungan kerjasama, atau pencarian kesepakatan yang digambarkan sebagai negosiasi. *Kedua*, negosiasi dapat berbentuk kondisi tawar-menawar yang sulit diantara mereka yang berkonflik. Wujud dari negosiasi adalah kesepakatan dari pihak-pihak yang berkonflik. *Ketiga*, peran pihak ketiga sebagai mediator. Bahwa pihak ketiga perlu memenuhi fungsi dan peranannya sebagai penengah, termasuk sebagai penyelenggara rapat (pemrakarsa, advokasi), penerah kemampuan, penjamin, pengawas dan pencipta perdamaian.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Desa**

Secara umum konsep dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat digambarkan sebagai peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan potensi desa (Soleh, 2017). Hal ini berarti memberikan kesempatan dan wewenang kepada masyarakat untuk aktif mengelola sumber daya yang ada, mengelola kemampuan mereka sendiri, menjadi subyek bukan sebagai obyek dalam pembangunan, berperan aktif dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang mempengaruhi tempat itu.

Menurut Sumarto yang dikutip Dewi mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat (Dewi, 2020). Sedangkan menurut Pitana yang dikutip Palimbunga, menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan

kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses (Palimbunga, 2017). Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan "*genuine participation*" atau dengan kata lain masyarakat sebagai pelaku pariwisata.

Jadi berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dengan ikut berperan aktif dalam pengembangan di suatu destinasi desa. Partisipasi yang ada sebagai wujud pemberdayaan masyarakat lokal yang tentunya memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan terlibat mengembangkan potensi yang ada di daerah mereka tinggal.

Untuk itu, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan potensi desa yang dimilikinya di suatu destinasi. Partisipasi tersebut merupakan sebuah tujuan dalam proses demokrasi yang berarti berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat, dengan demikian partisipasi sebagai wujud pemberdayaan masyarakat lokal yang tentunya memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan terlibat mengembangkan potensi yang ada di suatu destinasi.

Dengan demikian partisipasi merupakan peran aktif atau tidak aktifnya anggota dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan kata lain partisipasi bermakna mengambil bagian atau ikut serta dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dengan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Dimensi Pemikiran, yaitu partisipasi dalam bentuk pemikiran dalam usaha mengembangkan potensi desa yang dimilinya. Partisipasi ini akan terlihat dari masukan pemikiran, baik tentang cara pengembangan, paket program, sampai pada media yang digunakan dalam pengembangan potensi desa yang dimilinya.
- b. Dimensi Tenaga, yaitu sumbangan berupa tenaga atau fisik yang diperlukan dalam pengembangan desa wisata. Partisipasi ini dapat dilihat dari kesiapan secara fisik dalam mempersiapkan area kunjungan, pemandu wisata, penyediaan saran prasarana dan penyediaan peralatan penunjang kegiatan.
- c. Dimensi Materi, yaitu sumbangan berupa materi dalam pengembangan potensi desa, seperti pengumpulan dana pembangunan.

Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga.

Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal adalah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

#### **4. Pendekatan Pembangunan Potensi Desa**

Untuk merealisasikan dan mempercepat pembangunan pedesaan maka dapat dilakukan dengan dua pendekatan diantaranya:

- a. Pendekatan struktural. Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan system hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, baik di wilayah desa dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan system hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan structural dilakukan dengan langkah- langkah strategi sebagai berikut:
  - 1) Pengembangan jaringan pendukung
  - 2) Pengembangan system pengawasan berbasis masyarakat Pengembangan kapasitas kelembagaan.
  - 3) Peningkatan *aksebilitas* masyarakat terhadap informasi.
  - 4) Pengembangan *aksesibilitas* masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.
  - 5) Pengembangan *aksesibilitas* masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
  - 6) Pengembangan *Aksesibilitas* Masyarakat pada Sumber Daya Alam.
- b. Pendekatan Subyektif. Pendekatan subyektif (*non struktural*) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pedesaan dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi

melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumber daya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan. Pendekatan ini dapat dilakukan antara lain dengan:

- 1) Penggalian dan pengembangan nilai tradisional masyarakat.
- 2) Peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan serta.
- 3) Pengembangan kualitas diri.
- 4) Pengembangan kapasitas masyarakat
- 5) Pengembangan keterampilan masyarakat.
- 6) Peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan.

Dan untuk merealisasikan hal tersebut maka dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- 2) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah Pedesaan.
- 3) Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat petani dalam pelestarian lingkungan.
- 4) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah Desa

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan strategi pengembangan masyarakat Islam dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap potensi desa maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Pengembangan masyarakat berorientasi pada perubahan masyarakat yang terencana dan sistematis. *Kedua*, Perubahan masyarakat dari miskin tidak miskin, lingkungan yang tak sehat menjadi sehat dan hijau, dari angka partisipasi pendidikan rendah menjadi tinggi, dari pengangguran menjadi pekerja handal dan kreatif serta yang lain. Dalam konteks ini, pengembangan masyarakat memerlukan strategi perubahan, agar perubahan yang diusung dan dicita-citakan dapat terwujud nyata. *Ketiga*, Partisipasi masyarakat sebagai peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dengan ikut berperan aktif dalam pengembangan di suatu destinasi desa. Partisipasi yang ada sebagai wujud pemberdayaan masyarakat lokal yang tentunya memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan terlibat mengembangkan potensi yang ada di daerah mereka tinggal. *Keempat*, Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui Pengembangan Potensi Unggulan

dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. *Kelima*; Pembangunan desa harus mempertimbangkan dan berdasarkan pada potensi masing-masing desa (potensi fisik dan potensi non fisik) dengan mengedepankan keunggulan masing masing desa. *Keenam*, Dalam mengembangkan potensi desa agar lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu langkah-langkah, dasar, dan strategi kebijakan yang cerdas.; dan *Ketujuh*, Dalam upaya pengembangan potensi desa perlu memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

### Daftar Rujukan

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: Dari pemikiran menuju penerapan*. Fisip UI Press.
- Ansari, A. (2019). Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 23–41.
- Ansari, Raden Muyazin, A., Arifin. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Sebagai Konsep Pembangunan Karakter dalam Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0. *Ar-Risalah: Jurnal Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 18(2), 335–349. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i2.397>
- Budimanta, A., Prasetyo, A., & Rudito, B. (2008). Corporate social responsibility alternatif bagi pembangunan Indonesia. *Jakarta: ICSD*.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan sosial di dunia ketiga: Suatu pengantar*. Gadjah Mada University Press.
- Dewi, N. M. N. B. S. (2020). Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Putih Dalam Pengelolaan Sampah. *Sosial Sains dan Teknologi*, 1(1), 32–40.
- Fajar, A. S. M. (2019). Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(1), 1–12.
- Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 114–141.

- Gatlin, B. W., & Brown, C. D. (1990). Problem-solving orientations and decision-making styles among rehabilitation professionals. *The Journal of Rehabilitation*, 56(2), 21–27.
- Ilahi, W., & Munir, M. (2006). Manajemen dakwah. *Jakarta: Kencana*.
- Lubis, H. R. (2017). *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Islam*. Kencana.
- Machendrawaty, N., & Safei, A. A. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. PT Remaja Rosdakarya Offset–bandung.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*.
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Palimbunga, I. P. (2017). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *Melanesia*, 1(2), 15–31.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sulistiawan, B., & Supriatna, T. (2019). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bersih, Aman Dan Pintar di Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi Provinsi Jambi. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(3), 315–322.
- Susilo, S. (2008). *Sosiologi Komunikasi*. Surabaya. *Jengala Pustaka Utama*.
- Theresia, A., Khrisna, S. A., & Prima, G. P. (2015). Nugraha, and Totok Mardikanto. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Twelvetrees, A. (2008). *Community work*. Macmillan International Higher Education.